

Kolaborasi Antar Sekolah; Menjadi Alternatif Solusi

Pemeliharaan Sarana Fisik Pendidikan

Oleh: Tina Rahmawati, S. Pd

Abstrak

The availability of facilities for the effectiveness of educational process is very important. Unfortunately, many of educational institutions are facing with the lack of such facilities. Even, some of them are in bad conditions. They are not only having nothing of educational tools and aids, they also don't have good building which is necessary for the educational process to run smoothly and effectively. These bad condition are aggravated by bad maintenance, and some of them don't have good habit to maintaining their facilities properly too.

It is time to educational institutions to give more attention to facilities maintenance. The school headmaster should motivate the school members (teachers, staffs, and students) to have good habit and routine actions in maintaining the school facilities, and should have managerial planning to maintain their school facilities too. Schools, in the other side, should cooperate with the school committees for allocating enough money for facilities maintenance. And, at last but not least, collaboration among school to have common learning resources center may become something to discuss in order to increase the effectiveness and efficiency of educational facilities usage.

Keyword: collaboration, maintenance facilities

1. Pendahuluan

Adanya beberapa kebijakan baru dalam bidang pendidikan akhir-akhir ini berdampak pada banyaknya strategi yang ditemukan mengikuti alur pikiran para pejabat pemerintah. Kebijakan tersebut tentu saja bertujuan agar pendidikan di Indonesia lebih berkualitas seiring dengan berjalannya globalisasi. Pendidikan nasional dewasa ini seperti yang dikemukakan Suryati Sidharto (1995: 202) bahwa pendidikan kita saat ini sedang dihadapi oleh lima pokok masalah yaitu:

1. Masalah pemerataan pendidikan
2. Masalah daya tampung pendidikan
3. Masalah relevansi pendidikan
4. Masalah kualitas pendidikan
5. Masalah efisiensi dan efektifitas pendidikan

Krisis-krisis tersebut terus diupayakan oleh pemerintah untuk ditanggulangi salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan di tiap daerah. Salah satu dampak dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penetapan besarnya anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tersebut digunakan dalam rangka untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan. Pada dasarnya peningkatan mutu pendidikan diawali dengan peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Salah satu faktor penting yang

digunakan dalam proses belajar mengajar adalah adanya sarana fisik dan penunjang pendidikan (Depdikbud, 1996: 1)

Terkait dengan adanya masalah kualitas pendidikan saat sekarang ini persoalan minimnya fasilitas masih mendominasi masalah pendidikan. Tidak hanya bangunan fisik yang kurang memadai tetapi juga perawatan yang sangat kurang, sehingga kesan muncul dari sekolah adalah suram dan kurang menyenangkan. Banyak dijumpai beberapa sekolah memiliki sarana fisik seperti bangunan, laboratorium, perpustakaan dan mebeler masih kurang perawatan dan pemeliharaan. Mebeler dan perabot sekolah selain jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, kondisinya sudah banyak yang rusak. Terutama di Sekolah Dasar, bangku hanya cukup untuk dua orang bahkan banyak yang ditempati tiga atau empat orang. Disamping itu banyak mebeler seperti meja, kursi, almari dan sebagainya yang tidak digunakan dibiarkan saja menumpuk dalam ruangan tanpa ada penanganan untuk memperbaikinya. Hal tersebut dikarenakan minimnya dana untuk perawatan dan pemeliharaan fasilitas yang diterima sekolah yang khusus dianggarkan tiap tahunnya. Sebelum otonomi daerah, sekolah mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk melakukan perawatan gedung. Sejak otonomi daerah bergulir, dana perawatan sudah masuk dalam komponen Dana Alokasi Umum (DAU) pada kenyataannya tidak dimanfaatkan dengan baik. Harapannya pemerintah daerah memperhatikan perawatan sekolah supaya suasana belajar di sekolah menyenangkan.

Selain itu juga diketahui bahwa permasalahan lain terkait dengan fasilitas pendidikan yaitu pengelolaan sarana prasarana sekolah yang masih belum optimal dilaksanakan, mulai dari pengadaan, perencanaan, pendistribusian dan penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.

2. Manajemen dalam Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan

Ada dua asset besar yang perlu mendapatkan perhatian dari pengelolaan pendidikan di kabupaten/ kota, yaitu sumber daya manusia dan sarana pendidikan. Keduanya merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Asset sarana pendidikan dapat dikatakan merupakan faktor penentu, bukan hanya keberhasilan belajar, tetapi juga ketahanan siswa berada di sekolah. Jika sarana pendidikan di sekolah lengkap dan dalam kondisi bagus, siswa akan enggan meninggalkan sekolah.

Kebiasaan yang ada di sekolah saat ini adalah selalu berpikir untuk menambah dan menambah fasilitas yang sudah ada, bukan pada pengajuan dana-dana untuk mengadakan rehab/ perbaikan gedung atau ruang. Dalam mengajukan dana rehab/perbaikan tersebut sangat jarang, atau bahkan tidak pernah ada yang disertai dengan data rinci tentang kondisi gedung dan ruang yang akan direhab. Dengan demikian pengajuan dana hanya didasarkan pada perkiraan kasar saja. Pengajuan hanya berdasarkan perkiraan bagian gedung mana yang sekiranya perlu direhab, sehingga kadang-kadang penggunaan dana rehab menjadi kurang efisien.

Data mengenai identifikasi kondisi sarana yang sudah ada dengan dilengkapi perhitungan perbaikan dan pengadaan sarana tambahan merupakan sesuatu yang mendesak untuk diperhatikan. Identifikasi yang perlu dilakukan sekolah terhadap sarana fisik sekolah secara rinci mengenai kondisi dan kegunaan, pengetahuan untuk merawat fasilitas sekolah dan mengadministrasikan barang-barang tersebut. Semuanya itu merupakan hal mendesak yang perlu digarap oleh sekolah.

Menurut Syaifabudi (2003: 4) tentang banyaknya masalah dalam pengelolaan sarana antara lain: kurang adanya perencanaan yang matang, kondisi sarana pendidikan yang kurang terpelihara, tidak semua guru menggunakan sarana pendidikan, kurang tersedianya ruangan untuk menyimpan sarana dan masalah lainnya. Menyikapi permasalahan dalam perawatan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, sekolah memikul tanggung jawab yang cukup berat dalam hal dana karena minimnya jumlah alokasi untuk anggaran tersebut. Kondisi sarana pendidikan yang kurang terpelihara belum terpecahkan karena memang dibutuhkan biaya yang cukup besar dalam melaksanakan. Pengelola sekolah terutama pegawai bagian perlengkapan/sarana prasarana sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaannya tidak mampu berbuat banyak tanpa ada bantuan atau peran dari kepala sekolah untuk dapat mencari solusi dalam perawatan dan pemeliharaan fasilitas fisik.

Tanggung jawab pengelolaan fasilitas terutama pemeliharaan dan perawatan sarana fisik pendidikan merupakan tanggung jawab bersama baik

guru, siswa, dan pegawai/ karyawan. Mereka bekerja sama menjaga dan merawat segala bentuk fasilitas fisik yang ada di sekolah agar senantiasa terjaga kualitasnya, awet dan tidak lekas rusak. Penanganan terhadap sarana fisik yang tidak terpakai yang selama ini banyak dilaksanakan sekolah yakni dengan menempatkan barang/ benda dan mebeler yang sudah rusak di gudang saja sehingga kualitas atau keadaan alat/ media pengajaran tersebut tidak terawat atau mudah rusak. Penumpukan sarana fisik yang rusak atau tidak terpakai di tempat penyimpanan atau gudang dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa ada penanganan lebih lanjut tentu saja akan mengakibatkan barang menjadi semakin rusak dan akhirnya tidak dapat dimanfaatkan sama sekali.

Peran kepala sekolah sangatlah penting dalam pengelolaan sarana pendidikan agar fasilitas yang ada mampu dimanfaatkan secara optimal oleh guru dan siswa untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran. Kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengelola sarana pendidikan yang diwujudkan dengan melakukan sesuatu tindakan yang mampu menanggulangi masalah mengenai perawatan dan pemeliharaan sarana fisik sekolah. Apabila biaya/ dana tidak mencukupi, alternatif tindakan yang bisa dilakukan yakni dengan kolaborasi atau kerjasama dengan sekolah lain. Hal tersebut tentu saja dapat meminimalis besarnya biaya untuk perawatan fasilitas fisik di sekolah.

Manajemen dalam pemeliharaan fasilitas pendidikan sudah seharusnya ditetapkan sekolah secara terencana dan terorganisir agar tingkat kegunaan

dan kualitas barang senantiasa bernilai guna, caranya dengan melihat tingkat kerusakan dan kemampuan sekolah dalam hal keuangan. Menurut Ibrahim Bafadal (2003: 36) pemeliharaan atau perawatan sarana pendidikan merupakan salah satu kegiatan dalam manajemen fasilitas pendidikan, yang dibedakan antara pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tak terencana.

Pemeliharaan terencana adalah jenis pemeliharaan yang diprogramkan, diorganisir, dijadwal, dianggarkan dan dilaksanakan sesuai rencana dan diadakan monitoring atau evaluasi. Pemeliharaan terencana dibedakan menjadi dua yaitu bersifat pencegahan atau perawatan preventif dan bersifat korektif. Perawatan preventif merupakan perawatan yang bersifat pencegahan dari gangguan kemacetan atau kerusakan fasilitas/ sarana pendidikan, sedangkan perawatan korektif merupakan pengembalian yaitu mengembalikan peralatan pada kondisi standar sehingga dapat berfungsi normal sebagaimana mestinya. Berbeda dengan pemeliharaan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan yang belum diperkirakan sebelumnya, umumnya tingkat kerusakan yang terjadi adalah pada tingkat kerusakan berat.

Salah satu hal yang bisa dilakukan sekolah dalam merancang kegiatan pemeliharaan fasilitas yaitu dengan memberikan perhatian terhadap perlengkapan sekolah melalui evaluasi atau pengawasan terhadap kondisi gedung dan perlengkapan sekolah secara rutin agar selalu siap pakai serta awet/ tahan lama. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Morphet dkk (1974: 452) *Any school district should periodically evaluate existing plants. This is*

essential for reason of safety and the elimination of hazards, for the determination of optimum utilization.

Kegiatan dalam pengelolaan sarana fisik di sekolah itu akan dapat berjalan optimal apabila pihak personil aparat di Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota yang terkait dengan manajemen sarana pendidikan juga ditingkatkan kapasitasnya sekaligus memperbaiki organisasi dan sistem yang mendukung kinerja mereka.

3. Kolaborasi Antar Sekolah Menjadi Alternatif Solusi Pemeliharaan Fasilitas

Pemeliharaan fasilitas sekolah sudah saatnya menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas pendidikan. “Mencegah adalah lebih murah dari mengobati”, itulah semboyan yang belum “hidup” dalam dunia manajemen asset. Maksud dari semboyan itu terkait dengan pemeliharaan fasilitas bahwa ongkos perbaikan untuk kerusakan yang kecil pasti lebih murah daripada membeli. Dana rehab yang diajukan oleh sekolah saat ini belum menyentuh barang selain gedung dan ruang. Biaya perawatan yang diarahkan untuk mebeler dan mesin justru jarang dilakukan, alasannya mungkin karena kerusakan mebeler dan perabot hanya terjadi satu persatu, tidak menyeluruh untuk seluruh kelas atau sekolah, pengajuannya tidak diatur dengan standar harga, padahal seharusnya memerlukan perawatan secara rutin atau periodik. Banyak dijumpai kursi dan meja siswa yang kondisinya rusak menumpuk di ruangan, sudut selasar, atau di gudang, sebetulnya dapat segera menjadi baik

apabila sedikit saja diperbaiki, misalnya hanya memasang kembali kaki kursinya.

Sistem lama di beberapa sekolah menengah atas lebih banyak menggantungkan dirinya pada alokasi biaya operasional dari pusat, kecenderungan tersebut membuat sekolah pasif, tidak kreatif, kurang berinisiatif mencari tambahan dana, walaupun alokasi dana operasional yang disediakan oleh pemerintah pusat tidak memadai. Di sisi lain, ditemukan beberapa SMK swasta yang sepenuhnya mandiri, bisa berkembang meningkatkan mutu sekolahnya tanpa dukungan dana dari luar. Sistem baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan swadana pada SMK, dan posisi alokasi dana dari pemerintah pusat membantu atau subsidi. Sistem ini juga diharapkan mampu mendorong SMK berpikir dan berperilaku ekonomis.

Adanya kolaborasi dalam manajemen sarana fisik yang terjadi di SMA dan SMK bisa dilakukan melalui kerja sama antara kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru sebagai penggerak dan siswa sebagai pelaksana melalui kegiatan di luar kelas atau ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut sebagai praktek kerja yang mampu mendukung kompetensinya dalam dunia kerja. Pada kenyataannya biaya untuk penyediaan bahan kegiatan praktek sangat mahal sehingga dengan kolaborasi ini maka biaya praktek dapat diminimalis karena siswa bisa menggunakan bahan yang tersedia di sekolah yang butuh untuk diperbaiki. Sebagai contoh dalam kegiatan praktek di SMK jurusan teknik elektro dapat dengan melakukan praktek langsung di SMA yang membutuhkan bantuan perbaikan mengenai instalasi listrik; jurusan teknik

bangunan dengan praktik mengecat, dan jurusan perkayuan dengan perbaikan mebeler (kursi, meja dan almari) dan lain-lain.

Dengan diselenggarakannya kolaborasi ini maka dapat memberi dua keuntungan sekaligus yaitu bagi siswa SMK biaya untuk penyediaan bahan praktek siswa menjadi ringan serta siswa dapat meningkat kemampuannya sedangkan bagi SMU fasilitas fisik sekolah bisa terawat dan terpelihara kualitasnya tanpa harus menunggu biaya pembangunan fisik dari pemerintah.

Di sisi lain adanya kolaborasi antar sekolah dalam pemeliharaan sarana fisik tersebut diharapkan siswa SMK mampu menguasai kompetensi dalam bidang keilmuan yang diminati dan mampu bersaing dalam dunia kerja karena ilmu yang diperoleh diaplikasikan langsung dalam pengalaman berkarya selama mengikuti pendidikan formal. Kolaborasi tersebut juga mampu mendukung siswa untuk selalu berani mencoba dan berkarya sebagai wujud pengalaman kerja yang diperoleh dari satuan pendidikan. Karena dalam kenyataan di dunia kerja, kebanyakan perusahaan memberikan penghargaan kepada seseorang sesuai dengan kompetensi dan produktifitas kerja orang tersebut tanpa melihat apakah kompetensi itu diperoleh dari satuan pendidikan, pelatihan atau pengalaman kerja.

Program baru dalam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengemas pendidikannya dalam bentuk paket-paket kompetensi kejuruan, akan memudahkan pengakuan dan penghargaan terhadap program pelatihan yang berbasis kompetensi. Sistem baru akan memberikan artikulasi antara program pelatihan kejuruan dan program pendidikan kejuruan. Untuk memudahkan

proses artikulasi, beberapa SMK akan sekaligus didorong dan disiapkan melaksanakan program pelatihan berbasis kompetensi. Sistem baru ini memerlukan standarisasi kompetensi, dan kompetensi yang standar itu bisa dicapai melalui program pendidikan, program pelatihan, atau bahkan dengan pengalaman kerja yang ditunjang dengan inisiatif belajar sendiri.

Kegiatan kolaborasi dalam manajemen sarana fisik nantinya diharapkan lulusan SMK memenuhi kualifikasi dan dibutuhkan pasar kerja, yaitu dengan meningkatkan kompetensi lulusan. Konsekuensinya, dalam proses belajar siswa harus lebih banyak mendapat kesempatan untuk mengasah ketrampilannya, terutama pada saat kegiatan praktik di sekolah.

4. Penutup

Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan demi permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan dengan dikeluarkannya undang-undang tentang otonomi daerah yang salah satunya berdampak pada kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Permasalahan mengenai minimnya dana pendidikan membuat sekolah harus berpikir keras dan mengupayakan dana secara mandiri dalam mengelola sekolahnya terutama peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan. Dengan adanya kolaborasi antar sekolah menjadi alternatif solusi dalam pemeliharaan fasilitas fisik maka nantinya dana yang dikeluarkan bisa diminimalis karena tidak perlu menunggu sampai tingkat kerusakan yang besar. Selain itu juga bagi siswa SMK juga mampu meningkatkan kemampuannya dengan kegiatan

praktek tanpa mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan praktek yang sangat mahal.

Referensi

Depdikbud. (1996). *Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar*. Jakarta

Ibrahim Bafadal. (2003). *Manajemen Perlengkapan Sekolah, Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Morphet Jhon Reller. (1974). *Educational Organization and Administration: Concept, practice, and Issue (third edition)*. London: Prentice-Hall International, Inc

Syaifabudi. (2003). *Manajemen sekolah unggul/ plus*.
<http://www.Syaifabudi.org/manajemen.htm>.

Suryati Sidharto. (1995). *Pembaharuan Indonesia dan Latar Belakangnya*. Jakarta: Depdikbud